Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 11-20
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23234161

Analisis Pelanggaran Sila Ketiga Pancasila dalam Aksi Kekerasan OPM terhadap Masyarakat Sipil di Papua: Studi Kasus Pembunuhan Sopir Angkutan Wamena–Mbua Tahun 2026

Analysis of Violations of the Third Principle of Pancasila in OPM Violence against Civilians in Papua: A Case Study of the Killing of a Wamena–Mbua Public Transport Driver in 2026

Cinta Tri Tani Turnip[1], Christin Sinaga[2], Fensa Putri Milya[3], Mario Elvin Saragih[4], Serepina Simangunsong[5], Yeyen Erwina Sinaga[6]
[1-6] Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
Email: cintaturnip.4252121038@mhs.unimed.ac.id, christin.4252121031@mhs.unimed.ac.id, fensasiregar.4251121018@mhs.unimed.ac.id, mariosaragih.4252421003@mhs.unimed.ac.id, serepina.4252421042@mhs.unimed.ac.id, yeyensinaga.4252421039@mhs.unimed.ac.id

Abstract
Violence against civilians in conflict situations can have various impacts on security, social life, and community unity. This study aims to analyze violence against civilians in Papua through a case study of the killing of Aris Sanda, a Wamena Mbua transportation driver in 2026 based on the values of Pancasila particularly the third principle "The Unity of Indonesia". This research uwes a qualitative approach with a case method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants with relevant knowledge and experience related to the issue under study. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that acts of violence against civilians can be associated with Violations of the value of the Unity of Indonesia because they create fear, disrupt public safety and daily activities, and potentially increase divisions between groups. The case also demonstates the importance of respecting the rights and safety of civilians and resolving conflicts through peaceful and lawful means. Preventive efforts can be carried out by improving communication between goverment and the community, strengthening security in conflict-prone areas, and increasing public awareness in verifying information to prevent the spread of misinformation that mau ecalate conflict. This study emphasize the importance of implementing the value of Unity of Indonesia in Creating a safe and harmonis Society that respect differences.
Keywords: Third Principle of Pancasila, Unity of Indonesia, Violence, Civilians, Papua.

Abstrak
Kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap keamanan, kehidupan sosial, dan persatuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akhir kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua melalui studi kasus pembunuhan sopir angkutan Wamena Mbua, Aris Sanda pada tahun 2026 berdasarkan prespektif Pancasila khususnya sila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Data kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat dikaitkan dengan pelanggaran nilai Persatuan Indonesia karena menimbulkan rasa takut, mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat, serta berpotensi memperbesar perpecahan antarkelompok. Kasus tersebut juga menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak dan keselamatan masyarakat serta penyelesaian konflik melalui cara damai dan sesuai dengan hukum. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 5 Tahun 2025, P. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, penguatan keamanan di wilayah rawan konflik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memperbesar konflik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan menghargai perbedaan.
Kasta kunci: *Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, Kekerasan, Masyarakat Sipil, Papua.*

Article Info
Received date: 22 September 2026 Revised date: 30 September 2026 Accepted date:07 October 2026

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara sekaligus panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang menjadi dasar untuk membentuk masyarakat yang harmonis. Salah satu nilai penting terdapat dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menyatukan masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan bangsa. Persatuan ini diperlukan agar bangsa Indonesia tetap berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saly et al. (2023) menjelaskan bahwa persatuan dalam sila ketiga memiliki gagasan untuk menyatukan berbagai keberagaman menjadi satu kesatuan. Sedangkan persatuan Indonesia berkaitan dengan persatuan bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Nilai persatuan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keutuhan wilayah negara, tetapi juga dengan kehidupan masyarakat yang aman, saling menghormati, dan mampu menjaga hubungan sosial di tengah perbedaan. Widiarti dan Fitria (2024) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran dalam membangun kesatuan sekaligus memberikan dasar bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan nilai tersebut diperlukan agar perbedaan dalam masyarakat tidak berkembang menjadi konflik dan perpecahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, persatuan menjadi penting karena Indonesia terdiri dari masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, agama, dan kelompok yang beragam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan atau mengganggu keutuhan bangsa perlu dilihat sebagai masalah yang berkaitan dengan penerapan nilai Persatuan Indonesia.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan persatuan dan keutuhan bangsa terdapat dalam konflik di Papua. Saly et al. (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah salah satu isu yang muncul dalam konflik di Papua. Penelitian tersebut juga mengaitkan kekerasan dan pembunuhan di Papua dengan sila ketiga Pancasila karena tindakan tersebut dianggap bisa mengancam keutuhan wilayah NKRI dan berpotensi memperbesar perpecahan. Masalah ini juga terkait dengan keberadaan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia. Dalam kajian tentang penyimpangan nilai dasar Persatuan Indonesia, OPM dianggap sebagai contoh konflik yang menyimpang dari nilai persatuan karena ingin meninggalkan dan memisahkan diri dari Indonesia serta membentuk negara sendiri. Dengan demikian, isu OPM bisa dilihat dari perspektif nilai sila ketiga karena tujuan pemisahan ini langsung berkaitan dengan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang muncul dari kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap kondisi yang mereka alami. Kelompok ini bertujuan memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia dan membentuk wilayah yang merdeka. Nama OPM juga menjadi simbol perjuangan bagi kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Dengan demikian, OPM bisa dipahami sebagai kelompok yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan (Febrian et al., 2024).

Selain masalah pemisahan diri, konflik yang melibatkan kelompok bersenjata juga bisa memengaruhi masyarakat sipil. Kekerasan dalam wilayah konflik bisa menimbulkan rasa takut, mengganggu aktivitas masyarakat, serta memengaruhi kehidupan sosial. (Azari et al., 2026) menjelaskan bahwa konflik bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah, memberikan dampak terhadap masyarakat sipil, seperti pengungsian, gangguan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta trauma sosial. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan humanis dan dialogis dalam menyelesaikan konflik. Saly et al. (2023) menjelaskan bahwa isu di Papua perlu dilihat bukan hanya dari sisi konflik, tetapi juga dari penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini penting karena kehidupan masyarakat dalam negara yang menjunjung persatuan seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara. Kondisi ini bisa dilihat dalam kasus kekerasan terhadap sopir angkutan Wamena, Mbua, Aris Sanda yang dalam penelitian ini diteliti sebagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua pada bulan September 2026.

Berdasarkan kronologi yang digunakan dalam penelitian, korban diduga dicegat ketika melakukan perjalanan, kemudian dibawa secara paksa dan diminta menyampaikan pernyataan tertentu sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil bisa menjadi korban dalam situasi konflik. Kondisi seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keluarga, tetapi juga bisa mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kasus ini penting diteliti dari perspektif sila ketiga karena Persatuan Indonesia menuntut adanya kehidupan bersama yang menjaga keutuhan bangsa, menghargai keberagaman, serta menghindari tindakan yang bisa memperbesar perpecahan. Kekerasan terhadap masyarakat sipil bisa mengganggu rasa aman dan hubungan sosial masyarakat sehingga berpotensi memperbesar konflik. Dengan demikian, analisis terhadap kasus ini tidak hanya melihat tindakan kekerasan sebagai suatu peristiwa, tetapi juga melihat dampaknya terhadap penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan masyarakat. Selain dari perspektif Pancasila, kasus ini juga dilihat dari perspektif etika. Setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk merasa aman serta menjalani hidup tanpa ancaman atau paksaan. Widiarti & Fitria, (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan manusia dari kekerasan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia dan kehidupan bersama. Penyelesaian konflik seharusnya mengutamakan cara damai, komunikasi, musyawarah, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil agar konflik tidak semakin memperbesar perpecahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai sila ketiga Pancasila dalam kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua, khususnya kasus pembunuhan sopir angkutan Wamena, Mbua. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana konflik dan kekerasan tersebut bisa memengaruhi persatuan, rasa aman, serta kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menganalisisnya dari perspektif etika. Hasil kajian diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai Persatuan Indonesia melalui penghormatan terhadap masyarakat, pemeliharaan keamanan, dan penyelesaian konflik secara damai..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam makna pandangan dan pemahaman informan terhadap suatu fenomena sosial yang sedang diteliti. Metode studi kasus dipilih Karena penelitian berfokus pada satu kasus yang spesifik, yaitu pelanggaran nilai persatuan Indonesia dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif nilai-nilai Pancasila dan etika.

Data penelitian diperoleh dari 3 narasumber, yaitu aparat negara tokoh masyarakat, dan guru, yang dipilih secara perposif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu yang sedang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman mengenai keterkaitan kasus dengan nilai persatuan Indonesia dan prinsip etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Makna dan Nilai Sila Ketiga Pancasila

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia", berperan sebagai pilar utama yang menjamin integrasi teritorial, kohesi sosial, dan stabilitas politik di tengah realitas negara yang multikultural. Persatuan Indonesia adalah semua menjadi satu dalam Indonesia. Sila ketiga ini yang merupakan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno. Dalam persatuan Indonesia masyarakat dapat hidup bersatu dengan berbagai budaya yang

beragam, hidup damai, rukun, saling menghargai dan menghormati serta menerima budaya satu dengan yang lainnya (Pratomo, W., Nadziroh, N., & Chairiyah, 2024). Persatuan Indonesia berlambangkan burung garuda yang disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin yang besar dan rimbun bermakna manusia dapat berteduh di bawahnya. Hal ini yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia bahwa Bangsa Indonesia menjadi satu, utuh dan tidak terpecah belah. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap masyarakat seperti aksi kekerasan OPM terhadap masyarakat sipil di Papua, dianggap bertentangan langsung dengan makna dan implementasi dari sila Persatuan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Sila Ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia", memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Situmeang & Ndona, 2024). Dengan persatuan Indonesia kita dapat menciptakan kehidupan yang berdaulat, rukun, damai, dan serasi. Agar konflik dan perpecahan tidak terjadi maka dibutuhkan persatuan untuk tetap menjaga keberagaman itu. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia yaitu menumbuhkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara (Lintang, F. L. F., & Najicha, 2022). Selain itu menumbuhkan sikap saling menghormati antar semua golongan dan juga membina persatuan dan kesatuan untuk terwujudnya kemajuan negara. Di mana untuk mewujudkan kemajuan negara harus ditumbuhkan kesadaran dalam membina persatuan dan kesatuan bahwa walau berbeda-beda kita tetap satu jua seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Nilai-nilai fundamental yang diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila mencakup nilai nasionalisme dan kesetaraan pluralitas. Nilai nasionalisme dalam sila ketiga Pancasila diwujudkan melalui upaya menjaga persatuan, menghormati kedaulatan negara karena menaati hukum, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. Sedangkan nilai kesetaraan pluralitas menekankan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia merupakan bagian dari semua kehidupan bangsa yang harus dihormati dan ditempatkan dalam kedudukan yang setara. Intinya, setiap individu dan kelompok memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta kesempatan untuk menjalankan kehidupan sosial tanpa adanya perlakuan yang merendahkan atau diskriminatif. Dalam konteks kekerasan yang melibatkan kelompok OPM di Papua tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tersebut melanggar nilai-nilai fundamental pada sila ketiga Pancasila (Febrian et al., 2024). Hal ini menimbulkan rasa takut, mengganggu keamanan masyarakat, serta berpotensi memperbesar konflik dan perpecahan di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita menilai persatuan Indonesia dalam kasus ini dapat dipahami melalui pentingnya menghormati hak masyarakat untuk hidup yang aman, menjaga hubungan yang baik antar masyarakat serta menyelesaikan perbedaan dan konflik melalui cara yang damai dan sesuai dengan hukum.

Kasus pembunuhan sopir angkutan Wamena-Mbua secara nyata melanggar nilai-nilai tersebut yaitu kekerasan terhadap Aris Sanda sebagai masyarakat sipil Papua dalam situasi konflik bersenjata di Papua menunjukkan secara nyata pelanggaran nilai-nilai Persatuan Indonesia. Tindakan pencegahan terhadap kendaraan, pemindahan korban secara paksa ke madugaan tekanan untuk menyampaikan dukungan terhadap Papua Merdeka, hingga berakhir pada kematian korban merupakan peristiwa yang berdampak terhadap rasa aman masyarakat dan hubungan sosial di wilayah tersebut.

Jika dilihat dari perspektif makna sila ketiga persatuan Indonesia menekankan bahwa pentingnya menjaga keutuhan bangsa, menghargai keberagaman, serta menyelesaikan perbedaan dengan damai sesuai dengan hukum tanpa menggunakan kekerasan terhadap masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan masyarakat sipil

Papua dapat mengganggu kehidupan sosial dan berpotensi memperluas perpanjangan di tengah masyarakat.

Dampak dari pelanggaran sila Persatuan Indonesia ini sangat signifikan terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Tindakan kekerasan dalam kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya tetapi juga dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah konflik Papua. Kejadian seperti ini dapat menimbulkan ketakutan, menghambat aktivitas dari masyarakat, dan memperbesar jarak sosial antara kelompok-kelompok yang berada dalam situasi konflik. Selain itu, kekerasan bersenjata di Papua memberikan dampak berupa pengungsian massal, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta trauma sosial yang berkepanjangan. Peristiwa yang terjadi di ruang publik ini membuat masyarakat merasa tidak aman, terutama bagi orang yang harus melakukan perjalanan atau bekerja di wilayah yang memiliki risiko konflik. Penelitian menunjukkan penurunan pada aspek kesejahteraan dan pendidikan serta munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kecurigaan terhadap kelompok pendatang. Oleh karena itu, nilai persatuan Indonesia perlu diterapkan melalui upaya menjaga keamanan masyarakat, menghormati perbedaan, menghindari kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian konflik secara damai. Penerapan nilai tersebut menjadi penting agar keberagaman masyarakat Indonesia tetap menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Bangsa.

2. Kronologi Kasus Aksi Kekerasan OPM terhadap Masyarakat Sipil di Papua: Studi Kasus Pembunuhan Sopir Angkutan Wamena–Mbua Tahun 2026

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dikenal juga sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berdiri sejak tahun 1995. Gerakan ini masih eksis hingga saat ini dan beroperasi di daerah Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka tidak lain ialah keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Eksistensi gerakan OPM ini sangat mengancam kesatuan dan keutuhan NKRI. Dalam mencapai apa yang mereka inginkan, gerakan ini sering melakukan aksi kriminal bersenjata yang memakan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, dan wanita turut menjadi korban atas aksi brutal KKB ini. Hingga saat ini pun, kelompok ini sangat sulit dikendalikan apalagi diberhentikan, mengetahui mereka juga memiliki persenjataan yang canggih sehingga perlu waktu dan strategi tepat untuk menyelesaikan ini. Kini mereka masih berkeliaran dan bersembunyi di pegunungan dan hutan lebat Papua.

Gerakan separatisme dapat muncul karena adanya berbagai permasalahan dalam masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah, propaganda media, dan intervensi asing. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata dapat membuat masyarakat di suatu wilayah merasa kurang mendapatkan keadilan dan kesempatan. Selain itu, perbedaan etnis, budaya, dan agama dapat menimbulkan konflik apabila suatu kelompok merasa identitasnya kurang dihargai. Ketidakpuasan terhadap pemerintah juga dapat muncul karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap gerakan separatis. Dukungan dari pihak asing dalam bentuk dana, senjata, atau pelatihan juga dapat memperkuat kelompok separatis dan memperpanjang konflik (Febrian et al., 2024).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua. Konflik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang panjang dan berdampak terhadap kondisi keamanan serta kehidupan masyarakat sipil. Kekerasan

bersenjata dalam konflik Papua juga berkaitan dengan persoalan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan masyarakat sipil (Wonda & Nope, 2026)

Kasus kekerasan terhadap sopir travel bernama Aris Sanda alias Bapak Tasya, warga asal Toraja, terjadi pada Selasa, 15 September 2026 sekitar pukul 06.00 WIT di jalur Wamena menuju Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Saat itu, Aris Sanda sedang mengemudikan kendaraan dan membawa sejumlah penumpang. Di tengah perjalanan, kendaraan tersebut dihentikan oleh kelompok bersenjata. Para penumpang kemudian diperintahkan untuk kembali menuju Wamena, sedangkan Aris Sanda dibawa menuju kawasan Danau Habema.

Setelah dibawa menuju kawasan Danau Habema, korban diduga mengalami penyanderaan dan mendapat tekanan untuk menyatakan dukungan terhadap Papua Merdeka. Dalam sebuah video yang beredar, korban terlihat memegang bendera Bintang Kejora dan menyampaikan pernyataan mengenai dukungan terhadap Papua Merdeka. Dalam video tersebut juga terlihat beberapa orang bersenjata berada di sekitar korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan tekanan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam konflik Papua juga menjadi persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak hidup dan hak asasi manusia (Nugrahaa et al., 2026)

Setelah itu, korban diduga ditembak hingga meninggal dunia. Pada Rabu, 16 September 2026, tim gabungan menemukan kendaraan milik korban dalam kondisi terbakar di sekitar kawasan Danau Habema. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan jenazah Aris Sanda. Setelah lokasi diamankan, aparat melakukan proses evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di sekitar tempat kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter guna mengetahui kondisi medis serta sebab dan mekanisme kematiannya. Jenazah tiba di rumah sakit sekitar pukul 15.25 WIT dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara itu, aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta melanjutkan penyelidikan terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, kasus Aris Sanda menunjukkan adanya dugaan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata di Papua. Selain menyebabkan hilangnya nyawa, peristiwa kekerasan dalam konflik bersenjata juga dapat mengganggu rasa aman masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3. Analisis Pelanggaran Nilai Sila Ketiga Pancasila dan Etika dalam Kasus Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil di Papua

Kasus kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata di Papua dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia.” Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan, kebersamaan, toleransi, dan hubungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Penerapan nilai tersebut diperlukan agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat (Rahmadhani et al., 2025).

Berdasarkan kronologi yang digunakan dalam penelitian ini, Aris Sanda alias Tasya yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Papua diduga dicegat oleh kelompok bersenjata, kemudian dibawa secara paksa dan mendapat tekanan untuk menyampaikan pernyataan tertentu. Peristiwa tersebut kemudian berakhir dengan meninggalnya korban. Tindakan kekerasan seperti ini dapat mengganggu rasa aman masyarakat dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan nilai Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, saling menghargai, toleransi, dan mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat (Rahmadhani et al., 2025). Nilai persatuan juga dapat

diwujudkan melalui kepercayaan, kerja sama, musyawarah, kerukunan, serta sikap saling menghargai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (Fitriani & Nasiwan, 2025).

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan adanya pandangan mengenai dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat. Y.A. menyampaikan, *"Menurut saya konflik OPM yang terjadi di Papua itu menimbulkan banyak pemberitaan negatif ya, dan mengganggu kehidupan masyarakat termasuk di pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kegiatan lainnya."* Menurut Y.A., hal yang penting dalam kondisi tersebut adalah menjaga keamanan masyarakat dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Selanjutnya, H.M. selaku aparat kepolisian menyampaikan, *"Kalau menurut saya, konflik itu bisa mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia yang bisa mengakibatkan masyarakat terdampak."* Menurut H.M., konflik dapat mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan kontak fisik dan korban jiwa. H.M. juga menyampaikan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah dan komunikasi. Selain itu, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat M.S. selaku kepala dusun. M.S. menyampaikan, *"OPM itu cukup memprihatinkan, membuat cemas, karena masyarakat ikut terdampak bahkan sampai meninggal dunia."* M.S. juga menyampaikan, *"Kalau OPM ini terus terjadi, bisa mengganggu persatuan terjadi perpecahan antara kelompok. Padahal kita masih satu negara, jadi persatuan itu harus tetap dijaga."* Menurut M.S., konflik OPM menimbulkan kecemasan karena masyarakat dapat menjadi korban. Oleh karena itu, M.S. menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari jalan keluar secara damai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani dan Nasiwan (2025) yang menunjukkan bahwa kepercayaan, kerja sama, musyawarah, kerukunan, dan sikap saling menghargai merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan di masyarakat.

Berdasarkan ketiga hasil wawancara tersebut, konflik tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas. Rasa takut dan khawatir dapat membuat masyarakat merasa tidak aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Konflik juga dapat mengganggu kegiatan pendidikan, pekerjaan, perjalanan, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, konflik yang berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan jarak sosial, rasa curiga, serta menurunkan kepercayaan antarkelompok dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai persatuan melalui sikap saling menghargai, kerja sama, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (Rahmadhani et al., 2025; Fitriani & Nasiwan, 2025).

Kasus kekerasan terhadap Aris Sanda alias Tasya dapat dikaitkan dengan tidak terlaksananya nilai Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila karena tindakan tersebut dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, korban diduga dicegat saat melakukan perjalanan, dibawa secara paksa, mendapat tekanan untuk menyatakan dukungan terhadap Papua Merdeka, kemudian diduga ditembak hingga meninggal dunia. Rangkaian tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai Persatuan Indonesia yang mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Perbedaan pandangan mengenai persoalan politik seharusnya tidak diselesaikan melalui ancaman atau kekerasan. Setiap masyarakat memiliki hak untuk menjalankan aktivitasnya dengan aman serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Dampak dari kasus tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan

rasa takut dan khawatir, terutama bagi masyarakat yang harus bepergian atau bekerja di wilayah yang memiliki risiko konflik. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, seperti pekerjaan, perjalanan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, kekerasan yang terus terjadi dapat menimbulkan rasa saling curiga dan memperbesar jarak antara kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang maupun pandangan. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, hubungan sosial dapat menjadi semakin sulit untuk dibangun dan rasa percaya antarmasyarakat dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia perlu diwujudkan melalui kepercayaan, kerja sama, toleransi, dan hubungan sosial yang dapat mencegah perpecahan (Fitriani & Nasiwan, 2025).

Dari sisi etika, tindakan dalam kasus tersebut bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat, kebebasan, keselamatan, dan hak hidup manusia. Membawa seseorang secara paksa, mengancam dengan senjata, memaksa seseorang menyampaikan pernyataan, serta melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian merupakan tindakan yang tidak menghargai hak dasar manusia. Pembakaran kendaraan milik korban juga dapat merugikan pihak lain karena merupakan tindakan yang merusak hak kepemilikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang seharusnya dapat menjalankan kehidupannya tanpa ancaman, kekerasan, maupun paksaan.

Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Persatuan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Penyelesaian konflik perlu dilakukan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil, menghormati hak setiap individu, serta menggunakan cara-cara damai agar konflik tidak semakin memperbesar perpecahan dalam kehidupan berbangsa.

4. Rekayasa Ide dan Solusi Pencegahan Pelanggaran Sila Ketiga

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan rekayasa ide dan solusi yang fokus pada penguatan rasa persatuan, keamanan, toleransi, serta penyelesaian konfik secara damai.

Solusi pencegahan sila ketiga:

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Pemerintah perlu sering berdiskusi dengan masyrakat untuk megetahui masalah yang terjadi dan mencari jalan keluanya bersama. Pemerintah bersama aparat dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan secara rtin untuk mendengarkan kondisi, keluhan dan aspirasi masyrakat perlu bekerja sama agar konflik tidak terus terjadi.

- Meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat

Pemerintah dan apparat dapat meningkatkan koordinasikan dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama pada wilayah yang rawan konflik. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, bepergian, dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih aman.

- Mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang dapat memperbesar konflik

Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dibiasakan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya supaya tidak muncul kesalahpahaman atau konflik baru. Hal ini sesuai dengan pendapat H.M. yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua, khsusunya pembunuhan supir angkutan Wamen-Mbua, Aris Sanda, tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut, mengganggu

aktivitas masyarakat, serta berpotensi memperbesar perpecahan sosial. Ditinjau dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan nilai persatuan yang menekankan pentingnya menjaga keamanan, menghormati sesama, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, penguatan keamanan di wilayah rawan konflik, serta kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi yang belum terverifikasi, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, saling menghormati, dan tetap menjaga persyaratan Indonesia. Penerapan nilai Persatuan Indonesia secara nyata diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis dan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, disarankan agar pemerintah dan aparat keamanan meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil, khususnya di wilayah yang rawan konflik, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh setempat dalam mencegah terjadinya kekerasan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga persatuan, menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik, serta meningkatkan kemampuan dalam menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat secara lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak informan dan sumber daya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya menjaga persatuan dan keamanan masyarakat di wilayah konflik.

REFERENSI

Azari, A. I., Putri, S. I. S., Faradiba, S., Rasalhague, M. R., Hendrayana, D. A., Widodo, P. A., Haq, N. A., & Subianto, A. (2026). Konflik sosial kekerasan bersenjata dan keamanan masyarakat sipil di Intan Jaya Papua. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1), 125–130.

Febrian, M., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Penyebab Aksi Separatisme OPM Masih Ada Hingga Saat Ini. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(1), 39–45.

Fitriani, R., & Nasiwan. (2025). Peran modal sosial dalam mewujudkan sila Persatuan Indonesia pada masyarakat Padukuhan Cancangan. *MEDIA AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *14*(2), 793–807.

Lintang, F. L. F., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *11*(1), 79–85.

Nugrahaa, F. F., Lianyb, L., Damayantic, A. G., Ramadhinie, L. N. Z. A., Edelweisf, D., Saraswatig, D. A., Marselah, S., Muliai, P. R. K., Azkaj, N. A., Aisyk, P. R., & Dalimunthel, M. B. P. (2026). Peristiwa Kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *7*(1), 123–144.

Pratomo, W., Nadziroh, N., & Chairiyah, C. (2024). Implementasi sila ketiga Pancasila sebagai penguatan wawasan kebangsaan pada muatan PPKn siswa kelas IV di SDN Wojo. *Jurnal PEKAN*, *7*(2), 186–198.

Rahmadhani, A. D. N., Jannah, A. C., & Fadhila, R. N. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Sila Ketiga Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Indigenous Knowledge*, *4*(1), 50–56.

Situmeang, T. A., & Ndona, Y. (2024). Aktualisasi Nilai Sila Ketiga Pancasila: Menjaga Persatuan di Era. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, *2*(3), 295–304.

Widiarti, I., & Fitria, N. (2024). Peran penting Pancasila dalam membangun kesatuan dan keadilan sosial terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, *1*(3), 419–439.

Wonda, N. N., & Nope, L. I. (2026). Analisis Konflik Struktural Dalam Isu Kekerasan Bersenjata di

Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, *4*(2), 250–255.